



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 25 Maret 2017

Halaman: 2

PASTIKAN TAK ADA KERUGIAN NEGARA **Pansus PAD Klarifikasi Wajib Pajak**

YOGYA (KR) - Sejak dibentuk pekan lalu, Panitia Khusus (pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kota Yogya mulai meminta klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Usai mengundang tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pihak eksekutif, giliran wajib pajak yang belum melunasi pajak bakal turut diklarifikasi.

Menurut Ketua Pansus, Nasrul Khairi, masing-masing pihak diklarifikasi secara terpisah. Diawali dari BPK yang melakukan pemeriksaan serta rekomendasi atas temuan ketidakefektifan PAD 2016, kemudian dikroscek ke instansi terkait.

"Dua pihak sudah kami klarifikasi. Sedangkan pihak lain yakni beberapa wajib pajak yang menjadi temuan BPK, kami jadwalkan klarifikasi pekan depan," ungkapnya, Jumat (24/3).

Terdapat enam rekomendasi dari BPK

atas temuan ketidakefektifan pungutan PAD Kota Yogya 2016. Salah satu yang mendapat perhatian lebih ialah kurang bayar pajak reklame hingga mencapai Rp 953 juta. Sedangkan hasil klarifikasi dengan pihak eksekutif, jajaran Pemkot hingga saat ini masih dalam proses menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut. Sehingga, keterangan dari wajib pajak sangat dibutuhkan guna mendapatkan jaminan atas pembayaran tunggakan pajak.

Nasrul menambahkan, pihaknya sempat menyinggung potensi kerugian negara dalam ketidakefektifan PAD 2016. Apalagi jika Pemkot tidak melakukan pengelolaan atau penghapusan piutang yang tidak tertagih. "Dalam perspektif Inspektorat, temuan BPK itu tidak mengandung unsur kerugian negara. Tapi kami tetap memberikan perhatian supaya sisi administrasi

dibenahi. Apalagi piutang pajak dan retribusi nilainya cukup besar. Ada yang masuk kriteria piutang dapat ditagih, dan sebagian tidak bisa ditagih," urainya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogya Kadri Renggono memastikan, tidak ada potensi kerugian negara. Pasalnya, semua rekomendasi BPK tersebut sebagian sudah ditindaklanjuti, dan sebagian lain masih dalam proses.

Dari sisi substansi, pihaknya juga tengah menyusun standar operasional prosedur tentang pungutan pajak dan retribusi. Selain itu juga merencanakan perbaikan aturan sekaligus menetapkan potensi ketetapan pajak. "Sebagian besar itu dari sisi administrasi. Tapi semua sudah ditindaklanjuti. Apa yang sudah kami lakukan ini pun tetap kami laporkan ke pansus," tandasnya. (Dhi)-w

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005